

DAFTAR PUSTAKA

- Andayani, D., Nelly Sari, R., & Ratnawati, V. (2020). Analisis kepatuhan bendahara pemerintah dalam aspek perpajakan (studi pada Pemerintah Kabupaten Siak). *Jurnal Akuntansi*, 8(2), 187–200.
- Basri, Y. Z., & Mulyadi, S. (2005). *Keuangan negara dan analisis kebijakan utang luar negeri*. Rajawali Press.
- Bawono, I. R., & Novelsyah, M. (2016). *Perpajakan untuk bendaharawan*. UPP STIM YKPN.
- Devano, S., & Rahayu, S. K. (2006). *Perpajakan: Konsep, teori dan isu*. Kencana.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2016). *Bendahara mahir pajak* (edisi ke-3). Tim Penyusun Direktorat Peraturan Perpajakan II.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2017). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2017 tentang Pembayaran Pajak Secara Elektronik. Direktorat Jenderal Pajak.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-09/PJ/2020 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian Surat Setoran Pajak. Direktorat Jenderal Pajak.
- Farouq, M. (2018). *Hukum pajak di Indonesia: Suatu pengantar ilmu hukum*. Kencana.
- Gunadi. (2002). *Ketentuan pajak penghasilan*. Salemba Empat.
- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2020). *Perpajakan: Konsep, aplikasi, contoh, dan studi kasus* (edisi ke-3). Salemba Empat.
- Harjowiryo, M. (2019). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan bendahara pemerintah dalam penyetoran pajak. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 4(3), 195–217.
- Judisseno, R. K. (2005). *Pajak dan strategi bisnis*. Gramedia Pustaka Utama.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT). Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *APBN KITA: Kinerja dan fakta*. Tim Kehumasan dan Tim Teknis Asset Liability Committee Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Khuzaimah, M. F., Afifah, N., & Ka, V. S. den. (2021). Tinjauan penerapan pajak penghasilan pasal 22 oleh bendaharawan atas pengadaan barang pada Dinas Pendidikan Kota Makassar. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 5(1), 99–118.
- Kristiaji, B., & Mukarromah, A. (2020). *Meninjau konsep dan elevansi PPh final di Indonesia* (DDTC Working Paper).
- Mangkoesebroto, G. (2002). *Ekonomi publik*. BPFE.
- Mapanawang, M. A., Sondakh, J., & Pusung, R. (2018). Evaluasi penerapan PPh pasal 22 atas pembelian barang yang dibiayai dengan APBN di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(02).
- Pemerintah Indonesia. (2008). Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Pemerintah Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009.
- Pemerintah Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Pemerintah Indonesia. (2021). Peraturan Presiden 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Pemerintah Kota Tasikmalaya. (2014). Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah.
- Pemerintah Kota Tasikmalaya. (2020). Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 55 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan kasus* (edisi ke-11). Salemba Empat.

- Rosdiana, H., & Irianto, E. S. (2014). *Pengantar ilmu pajak: Kebijakan dan implementasi di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Sampouw, R., & Elim, I. (2019). Analisis perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 atas pembelian barang yang dibiayai oleh APBN pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Manado. *Jurnal EMBA*, 7(3), 4301–4310.
- Setiawan, B., & Fitriandi, P. (2017). *Kupas tuntas PPh pemotongan dan pemungutan* (edisi ke-2). Salemba Empat.
- Subandi, H., & Fadhil, M. I. I. (2018). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak bendahara desa Di Kota Batu. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(1), 1–16.
- Wae, D., Sabijono, H., & Lambey, R. (2019). Analisis perhitungan dan pemotongan PPh pasal 22 atas pengadaan barang pada Kantor Perwakilan Pemda Kabupaten Kepulauan Talaud di Manado. *Indonesia Accounting Journal*, 1(2), 81.
- Yudkin, L. (1971). *A legal structure for efective income tax administration*. International Tax Program Harvard Law School Cambrige.
- Yulita, R. O. (2021). *Tinjauan pelaksanaan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan 22 atas pembelian barang oleh Bendahara Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali*. Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Zahra, D. A. (2021). *Tinjauan pelaksanaan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman*. Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Zain, M., & Arinta, K. (1990). *Pembaharuan perpajakan nasional*. Citra Aditya Bakti.